

30 JUNI 2026

T-14a/08300/PW.120/LHN/2026



LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGELOLAAN PENGADUAN BPS SEMESTER I

2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan Pengaduan BPS Semester I Tahun 2026** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan intern dalam melakukan monitoring terhadap pengelolaan pengaduan di lingkungan Badan Pusat Statistik selama Semester I Tahun 2026. Laporan ini menyajikan hasil monitoring pengelolaan pengaduan melalui berbagai kanal, perkembangan penanganan pengaduan, hasil monitoring pengaduan terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, serta kendala dan upaya perbaikan yang dilakukan. Hasil monitoring ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan serta memperkuat tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan, kerja sama, dan kontribusi berbagai pihak di lingkungan Badan Pusat Statistik. Oleh karena itu, disampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga laporan ini dapat disusun dengan baik. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan pengelolaan pengaduan pada masa yang akan datang.

Jakarta, 30 Juni 2026
Inspektur III,



Ahmad Avenzora

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Landasan Penugasan	6
1.3 Dasar Hukum	7
1.4 Tujuan	7
1.5 Sasaran	8
1.6 Metodologi.....	8
1.7 Ruang Lingkup	8
BAB II HASIL PENGAWASAN.....	9
2.1 Pengawasan Pengelolaan Pengaduan WBS-BPS	9
2.2 Pengawasan Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR!.....	11
2.3 Pengawasan Pengaduan terkait Sensus Ekonomi 2026	13
BAB III KENDALA DAN TINDAK LANJUT	16
3.1 Kendala	16
3.2 Tindak Lanjut.....	16
BAB IV PENUTUP	18
4.1 Kesimpulan.....	18
4.2 Rekomendasi	18
LAMPIRAN	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Distribusi Pengaduan per Kategori periode Januari – Juni Tahun 2026	9
Gambar 2.2 Hasil Verifikasi Laporan Pengaduan Semester I Tahun 2026.....	10
Gambar 2.3 Status Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Semester I Tahun 2026 ...	10
Gambar 2.4 Jumlah Pengaduan per Bulan.....	11
Gambar 2.5 Komposisi Pengaduan terkait Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Berdasarkan Kategori.....	13
Gambar 2.6 Tren Jumlah Pengaduan terkait Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Berdasarkan Kluster.....	14
Gambar 2.7 Status Tindak Lanjut Laporan Pengaduan terkait SE2026 Semester I Tahun 2026.....	14

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengaduan Berdasarkan Kategori	9
Tabel 2.2 Jumlah laporan pada aplikasi SP4N LAPOR! berdasarkan kategori.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan sesuai dengan perencanaan di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) diperlukan suatu pengawasan. Inspektorat Utama BPS sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPS dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko; memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS.

Pengelolaan pengaduan oleh Tim Pengawasan Pencegahan Korupsi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan bagian dari mekanisme pengendalian internal dalam menjaga integritas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS, guna memastikan setiap laporan diproses secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Monitoring, verifikasi, dan updating status telaah pengaduan merupakan langkah penting dalam menjaga integritas sistem pengaduan internal BPS. Dalam menghadapi berbagai laporan yang masuk, auditor internal bertugas untuk memastikan bahwa setiap pengaduan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem dalam menangani laporan.

1.2 Landasan Penugasan

1. Nomor dan Tanggal : T-30/08300/PW.100/2026
Surat Tugas : Tanggal 26 Februari 2026
2. Tanggal Penugasan : 20 Februari 2026 s.d. 31 Desember 2026
3. Tim

Pengendali Teknis : Desmaniar Yoganingtyas SE, M.Ak.
NIP. 198312022009022012

Ketua Tim : Novrizal, S.E., M.S.E.
NIP. 198411302010031001

Anggota Tim : Harisa Salsabilla S.Ak.
NIP. 200207082025062002
Iqbal Abiyyu S.T.
NIP. 199809272025061001

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan pengawasan serta penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan Pengaduan BPS Semester I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 mengatur tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Pusat Statistik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
9. Keputusan Kepala BPS No. 377 Tahun 2026 tentang Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
10. Surat Keputusan Inspektur Utama Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tim Kerja di Lingkungan Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik Tahun 2026.

1.4 Tujuan

Kegiatan pelaksanaan pengelolaan Pengaduan BPS Semester I Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Memperoleh gambaran pelaksanaan pengelolaan pengaduan secara administratif di lingkungan Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik;

2. Memantau penerimaan dan perkembangan status laporan pengaduan yang disampaikan melalui berbagai kanal pengaduan;
3. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan penguatan koordinasi dan pengelolaan sistem, guna mendukung efektivitas pengelolaan pengaduan pada periode selanjutnya.

1.5 Sasaran

Sasaran kegiatan monitoring pengelolaan pengaduan Semester I Tahun 2026 meliputi:

1. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan secara administratif oleh Tim Pengelola Pengaduan di lingkungan Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik;
2. Pencatatan, pemutakhiran, dan pemantauan status laporan pengaduan yang diterima melalui berbagai kanal pengaduan;
3. Pemanfaatan sistem pengelolaan pengaduan sebagai media penerimaan dan pemantauan laporan pengaduan selama periode monitoring.

1.6 Metodologi

Metodologi yang digunakan meliputi:

1. Pemantauan penerimaan laporan pengaduan, yaitu mengidentifikasi jumlah dan karakteristik laporan yang masuk melalui berbagai kanal pengaduan;
2. Pemantauan status penanganan pengaduan, meliputi status laporan sebagai pengaduan atau bukan pengaduan, serta status tindak lanjut dalam sistem pengelolaan pengaduan;
3. Rekapitulasi dan analisis data pengaduan, yang mencakup media penyampaian, waktu penerimaan, serta perkembangan status penanganan laporan;
4. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan pengaduan secara administratif, untuk memperoleh gambaran umum mengenai efektivitas proses pengelolaan pengaduan selama periode monitoring.

1.7 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan monitoring meliputi seluruh laporan pengaduan masyarakat yang diterima melalui berbagai kanal pengaduan selama periode 1 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026, terbatas pada aspek administrasi, pencatatan, dan pemantauan status pengelolaan pengaduan.

BAB II

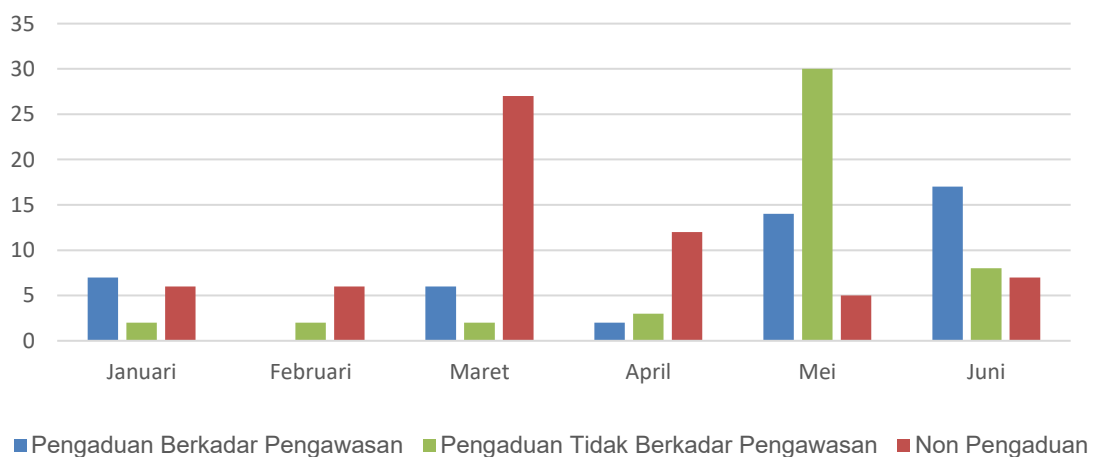
HASIL PENGAWASAN

2.1 Pengawasan Pengelolaan Pengaduan WBS-BPS

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan pengaduan selama Semester I Tahun 2026, tercatat 156 laporan yang masuk, seluruhnya telah melalui proses verifikasi awal. Dari jumlah tersebut, 46 laporan (29%) merupakan pengaduan berkadar pengawasan, 47 laporan (30%) merupakan pengaduan tidak berkadar pengawasan dan 63 laporan (41%) merupakan bukan pengaduan. Mayoritas laporan diterima melalui kanal WBS-BPS. Sementara itu, pada periode Juni terjadi peningkatan laporan masuk melalui SP4N-LAPOR!. Berdasarkan rekapitulasi bulanan, jumlah laporan tertinggi tercatat pada bulan Maret 2026.

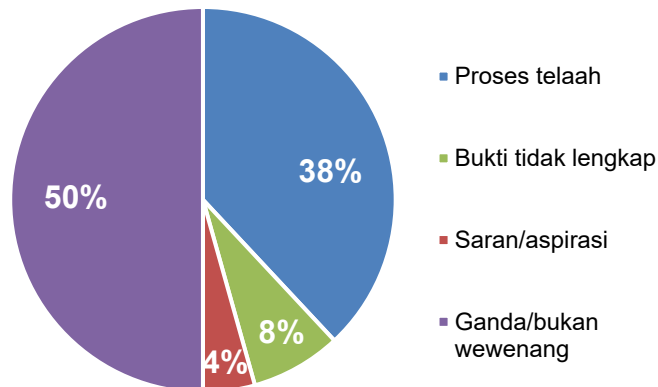
Tabel 2.1 Pengaduan Berdasarkan Kategori

Kategori	Bulan ke-						Rekapitulasi	Presentase
	I	II	III	IV	V	VI		
Pengaduan Berkadar Pengawasan	7	0	6	2	14	17	46	29%
Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	2	2	2	3	30	8	47	30%
Non Pengaduan	6	6	27	12	5	7	63	41%
Total	15	8	35	17	29	32	156	100%



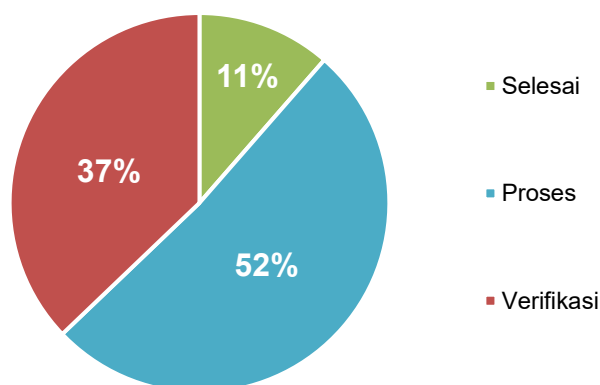
Gambar 2.1 Distribusi Pengaduan per Kategori periode Januari – Juni Tahun 2026

Dari 93 laporan pengaduan yang diverifikasi, sebanyak 46 laporan (50%) tidak ditindaklanjuti karena merupakan pengaduan yang bukan merupakan kewenangan serta terindikasi ganda/duplikat, sedangkan 7 laporan (8%) belum dapat diproses karena keterangan dan/bukti pendukung tidak lengkap dan 4 laporan (4%) lainnya merupakan saran/aspirasi. Dengan demikian, terdapat 35 laporan pengaduan (38%) yang memenuhi kriteria dan dilanjutkan ke tahap telaah.



Gambar 2.2 Hasil Verifikasi Laporan Pengaduan
Semester I Tahun 2026

Hingga akhir Semester I Tahun 2026, terdapat 35 laporan yang telah ditangani. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4 laporan (12%) telah selesai ditindak lanjuti, 18 laporan (51%) masih dalam proses telaah, dan 13 laporan lainnya (37%) masih berada pada tahap verifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar laporan masih dalam proses penanganan sesuai tahapan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, objektivitas, serta asas praduga tidak bersalah dalam setiap proses penelaahan dan verifikasi.

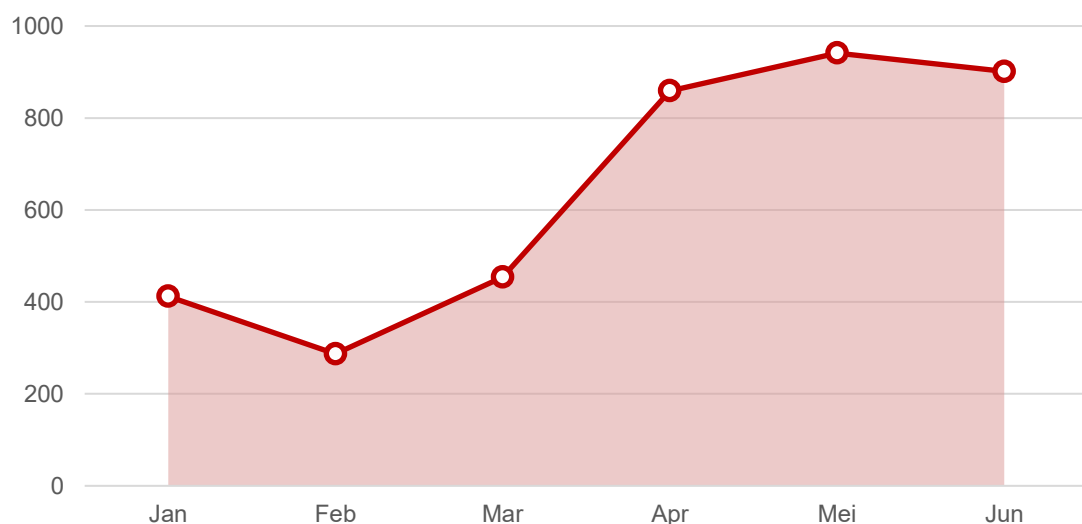


Gambar 2.3 Status Tindak Lanjut Laporan Pengaduan
Semester I Tahun 2026

Secara keseluruhan, hasil monitoring menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi dan penanganan pengaduan telah berjalan secara sistematis. Komposisi laporan yang masuk dan hasil penanganannya memberikan gambaran mengenai karakteristik pengaduan yang diterima, serta menjadi bahan evaluasi untuk penguatan pengelolaan pengaduan secara bertahap ke depan.

2.2 Pengawasan Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR!

Berdasarkan data yang tercatat dalam statistik aplikasi SP4N-LAPOR! Pada periode 1 Januari – 30 Juni 2026, diperoleh data yang masuk berdasarkan kategori pengaduan dan saluran pengaduan sebagai berikut:



Gambar 2.4 Jumlah Pengaduan per Bulan

Berdasarkan Gambar 2.3 di atas, Badan Pusat Statistik menerima sebanyak 3.854 laporan selama periode Januari–Juni. Jumlah laporan menunjukkan tren yang cenderung meningkat sepanjang periode, meskipun terdapat sedikit fluktuasi. Peningkatan volume laporan mulai terlihat pada pertengahan periode dan mencapai titik tertinggi pada bulan Mei sebanyak 941 laporan, sebelum mengalami sedikit penurunan pada Juni. Kondisi tersebut menjadi catatan dalam penguatan pengelolaan pengaduan, khususnya untuk mengantisipasi peningkatan volume laporan pada periode dengan intensitas pengaduan yang tinggi.

Tabel 2.2 Jumlah laporan pada aplikasi SP4N LAPOR! berdasarkan kategori

Kategori	Jumlah
Permintaan Informasi	3791
Pengaduan Berkadar Pengawasan	44
Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	14
Aspirasi	5
Total	3854

Berdasarkan data di atas, laporan didominasi oleh Permintaan Informasi sebanyak 3.791 laporan (98,37%). Dominasi permintaan informasi menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap data dan produk statistik yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik.

Selanjutnya, Pengaduan Berkadar Pengawasan tercatat sebanyak 44 laporan (1,14%), Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan sebanyak 14 laporan (0,36%), dan Aspirasi masyarakat tercatat sebanyak 5 laporan (0,13%). Proporsi pengaduan berkadar pengawasan walaupun jumlahnya relatif kecil, tetapi menjadi catatan untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

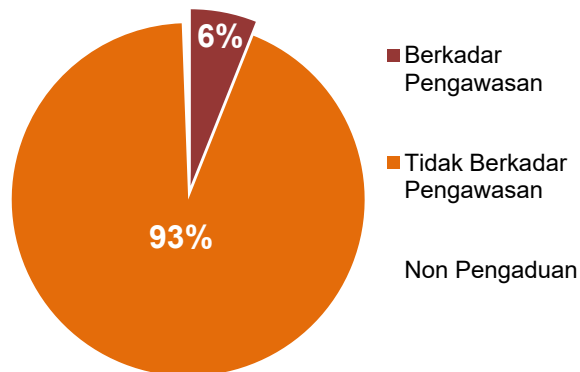
Berdasarkan status tindak lanjut, sebanyak 3.854 laporan (100%) telah ditindaklanjuti, dengan rincian 3.838 laporan (99,58%) berstatus selesai dan 16 laporan (0,42%) masih dalam proses. Tidak terdapat laporan yang belum terverifikasi maupun laporan yang telah terdisposisi tetapi belum ditindaklanjuti.

Sementara itu, terdapat 8 laporan yang berstatus arsip dan tidak termasuk dalam perhitungan total laporan yang menjadi dasar tindak lanjut. Tidak terdapat laporan yang berstatus tertunda.

Secara sebaran wilayah, pengelolaan pengaduan menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan seluruh laporan telah ditindaklanjuti. Meskipun masih terdapat 16 laporan yang sedang diproses, secara umum tingkat tindak lanjut telah mencapai 100 persen dan pengelolaan laporan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

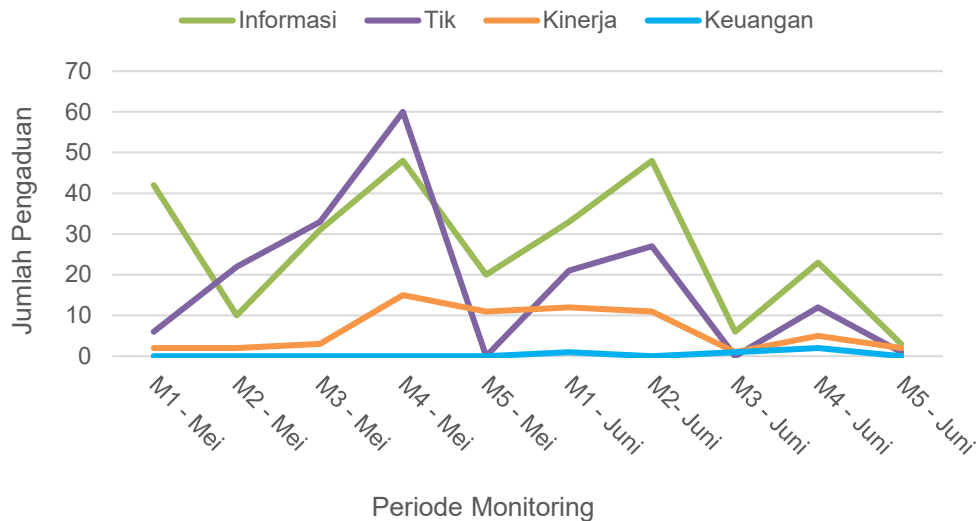
2.3 Pengawasan Pengaduan terkait Sensus Ekonomi 2026

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan dalam periode Mei hingga Juni 2026 terdapat pengaduan yang berkaitan dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, tercatat sebanyak 514 laporan masuk yang terbagi dalam beberapa kategori diantaranya sebanyak 31 laporan (6%) pengaduan berkadar pengawasan, 480 laporan (93%) pengaduan tidak berkadar pengawasan dan 3 laporan (1%) non pengaduan.



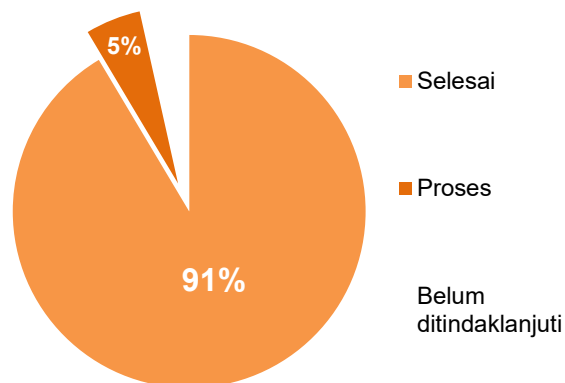
Gambar 2.5 Komposisi Pengaduan terkait Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Berdasarkan Kategori

Berdasarkan hasil monitoring, jumlah pengaduan pada setiap kluster mengalami fluktuasi selama periode Mei hingga Juni 2026. Kluster informasi dan TIK secara konsisten mendominasi jumlah laporan pada hampir seluruh periode monitoring, meskipun keduanya menunjukkan pola kenaikan dan penurunan yang berbeda. Di sisi lain, pengaduan terkait kinerja relatif stabil dalam jumlah yang lebih rendah, sedangkan pengaduan terkait keuangan sangat terbatas sepanjang periode monitoring. Secara kumulatif, pengaduan didominasi oleh kluster informasi sebanyak 264 laporan (51%), diikuti kluster TIK sebanyak 182 laporan (35%), kluster kinerja sebanyak 64 laporan (13%), dan kluster keuangan sebanyak 4 laporan (1%).



Gambar 2.6 Tren Jumlah Pengaduan terkait Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026
Berdasarkan Kluster

Berdasarkan hasil monitoring, tercatat 470 laporan (91%) telah selesai ditindaklanjuti sementara itu sebanyak 26 laporan (5%) masih dalam proses, dan 18 laporan lainnya (4%) belum ditindaklanjuti.



Gambar 2.7 Status Tindak Lanjut Laporan Pengaduan terkait SE2026
Semester I Tahun 2026

Secara keseluruhan, hasil monitoring menunjukkan bahwa pengelolaan pengaduan terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 telah berjalan dengan baik, yang tercermin dari tingginya persentase laporan yang telah ditindaklanjuti. Mayoritas laporan yang diterima berupa permintaan informasi dan kendala teknis terkait teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat menjadi masukan bagi BPS untuk memperkuat penyediaan informasi kepada masyarakat serta meningkatkan keandalan sistem pendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Materi pengaduan lainnya untuk kegiatan Sensus Ekonomi 2026 adalah terkait transparansi proses seleksi, dugaan nepotisme dan layanan yang kurang responsive. Hal ini perlu menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi BPS untuk memperbaiki mekanisme perekrutan petugas baik dalam kegiatan

sensus maupun survei selanjutnya. Sementara itu, laporan yang masih dalam proses maupun yang belum ditindaklanjuti perlu terus dipantau agar seluruh pengaduan dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai mekanisme yang berlaku.

Adapun langkah-langkah mitigasi yang dapat menjadi perbaikan khusus untuk kegiatan SE2026 atas pengaduan-pengaduan yang masuk terkait kegiatan SE2026 adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasikan seluruh proses rekrutmen sebagai bentuk akuntabilitas evaluasi;
2. Lakukan peninjauan terhadap seluruh tahapan rekrutmen untuk memastikan proses berjalan secara terbuka, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Pastikan seluruh peserta memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atau intervensi pihak manapun.

BAB III

KENDALA DAN TINDAK LANJUT

3.1 Kendala

Dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan selama Semester I Tahun 2026, secara umum mekanisme penerimaan, verifikasi, disposisi, dan tindak lanjut laporan telah berjalan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kondisi yang memerlukan perhatian dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah terjadinya eskalasi serangan spam pada sistem Whistleblowing System (WBS) pada periode Maret 2026. Meningkatnya laporan yang terindikasi sebagai spam berpotensi menambah beban proses verifikasi serta mengurangi efektivitas pengelola dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan laporan yang memiliki substansi.

Selain itu, masih terdapat sejumlah laporan yang berada dalam tahap verifikasi maupun telaah pada akhir periode pelaporan. Kondisi tersebut memerlukan pemantauan lebih lanjut agar setiap laporan dapat ditangani sesuai dengan tahapan, kewenangan, dan batas waktu yang berlaku. Pada pengelolaan pengaduan terkait Sensus Ekonomi 2026, masih terdapat laporan yang belum selesai ditindaklanjuti sehingga perlu terus dipantau penyelesaiannya.

3.2 Tindak Lanjut

Pemantauan secara berkala dilakukan terhadap laporan yang masih berada dalam tahap verifikasi dan telaah untuk memastikan proses penanganannya berjalan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang berlaku. Laporan yang memerlukan pendalaman lebih lanjut ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi dan koordinasi dengan unit terkait sesuai dengan substansi dan kewenangannya.

Dalam menghadapi laporan yang terindikasi sebagai spam pada sistem WBS, dilakukan penyaringan dan verifikasi untuk mengidentifikasi laporan yang tidak memiliki substansi serta memastikan laporan yang memiliki substansi tetap dapat ditindaklanjuti. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat pengendalian dan keamanan sistem, termasuk melalui penyempurnaan mekanisme penyaringan laporan guna meminimalkan gangguan terhadap proses pengelolaan pengaduan.

Khusus terhadap pengaduan yang berkaitan dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, laporan yang masih dalam proses maupun yang belum ditindaklanjuti terus dipantau agar dapat diselesaikan secara tepat waktu. Hasil monitoring juga

dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan penyediaan informasi kepada masyarakat, keandalan sistem pendukung kegiatan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya pada proses rekrutmen petugas.

Secara keseluruhan, hasil monitoring pengaduan menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi pola dan permasalahan yang muncul, memperkuat koordinasi antarunit, serta menyempurnakan mekanisme pengelolaan pengaduan secara berkelanjutan agar pelaksanaannya semakin efektif, responsif, dan akuntabel.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengawasan pengelolaan pengaduan selama Semester I Tahun 2026, secara umum pengelolaan pengaduan di lingkungan Badan Pusat Statistik telah berjalan dengan baik melalui mekanisme verifikasi, tindak lanjut, dan penyelesaian sesuai dengan tahapan yang berlaku.

Pengelolaan pengaduan pada WBS-BPS, SP4N-LAPOR!, maupun pengaduan terkait Sensus Ekonomi 2026 menunjukkan bahwa sebagian besar laporan telah ditindaklanjuti. Selain itu, hasil monitoring memberikan gambaran bahwa sebagian besar laporan yang diterima merupakan permintaan informasi dan kendala teknis, sedangkan pengaduan berkadar pengawasan memiliki proporsi yang relatif kecil namun tetap memerlukan perhatian dalam penanganannya.

Di sisi lain, masih terdapat laporan yang memerlukan proses lebih lanjut serta kendala berupa serangan spam pada sistem WBS. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan efektivitas, keamanan, dan kualitas pengelolaan pengaduan secara berkelanjutan.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring terhadap laporan yang masih dalam proses agar dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
2. Memperkuat pengamanan dan pengendalian sistem WBS, khususnya dalam menghadapi laporan yang terindikasi spam;
3. Meningkatkan koordinasi antarunit terkait dalam proses verifikasi, penanganan, dan penyelesaian pengaduan; dan
4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan pengaduan sebagai dasar perbaikan mekanisme dan peningkatan kualitas layanan pengaduan.

Lampiran 1
 Nomor : T-14a/08300/PW.120/LHN/2026
 Tanggal: 30 Juni 2026

LAPORAN BERDASARKAN MEDIA PENGADUAN PADA WBS-BPS

No.	Sumber Laporan		Verifikasi				Tindak Lanjut			Status	
	Tipe Media	Sumber	Total	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Non Pengaduan	Telaah	Pelimpahan	Tutup	Proses	Selesai
1	Langsung	Lapor Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Langsung	Lapor Online	1	-	1	-	-	-	1	-	1
3	Website	WBS-BPS	103	26	25	52	10	1	84	8	87
4	Website	SP4N-Lapor!	14	12	2	-	10	-	4	9	5
5	Email	Pengaduan	38	8	19	11	1	-	31	1	31
6	Email	Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Surat	Disposisi Fisik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Surat	Disposisi Srikandi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Chat	Whatsapp	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Chat	SMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			156	46	47	63	21	1	120	18	124

Lampiran 2
 Nomor : T-14a/08300/PW.120/LHN/2026
 Tanggal: 30 Juni 2026

LAPORAN BERDASARKAN LOKASI PENGADUAN PADA WBS-BPS

No.	Wilayah		Verifikasi				Tindak Lanjut			Status	
	Kode	Nama Wilayah	Total	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Non Pengaduan	Telaah	Pelimpahan	Tutup	Proses	Selesai
1	0000	Badan Pusat Statistik	49	3	24	22	2	1	44	1	46
2	0100	Kepala BPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0200	Sekretariat Utama	2	1	1	-	1	-	1	1	1
4	0300	Deputi Bidang Metodologi Dan Informasi Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0400	Deputi Bidang Statistik Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0500	Deputi Bidang Statistik Produksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0600	Deputi Bidang Statistik Distribusi Dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	0700	Deputi Bidang Neraca Dan Analisis Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0800	Inspektorat Utama	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1100	BPS Provinsi Aceh	4	1	2	1	1	-	3	1	3
11	1200	BPS Provinsi Sumatera Utara	9	1	1	7	-	-	8	-	8
12	1300	BPS Provinsi Sumatera Barat	3	-	-	3	-	-	3	-	3

No.	Wilayah		Verifikasi				Tindak Lanjut			Status	
	Kode	Nama Wilayah	Total	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Non Pengaduan	Telaah	Pelimpahan	Tutup	Proses	Selesai
13	1400	BPS Provinsi Riau	3	-	1	2	-	-	3	-	3
14	1500	BPS Provinsi Jambi	4	3	-	1	1	-	2	-	3
15	1600	BPS Provinsi Sumatera Selatan	3	1	2	-	-	-	1	-	1
16	1700	BPS Provinsi Bengkulu	2	1	-	1	1	-	1	1	1
17	1800	BPS Provinsi Lampung	3	1	2	-	1	-	2	1	2
18	1900	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	-	-	1	-	-	1	-	1
19	2100	BPS Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	3100	BPS Provinsi D.K.I Jakarta	7	-	1	6	-	-	7	-	7
21	3200	BPS Provinsi Jawa Barat	13	8	2	3	4	-	6	4	6
22	3300	BPS Provinsi Jawa Tengah	13	6	1	6	1	-	11	1	11
23	3400	BPS D.I. Yogyakarta	1	-	-	1	-	-	1	-	1
24	3500	BPS Provinsi Jawa Timur	11	5	2	4	2	-	7	2	7
25	3600	BPS Provinsi Banten	6	3	1	2	3	-	3	3	3
26	5100	BPS Provinsi Bali	1	-	-	1	-	-	1	-	1
27	5200	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	-	1	-	-	-	1	-	1
28	5300	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	2	1	1	-	-	-	1	-	1
29	6100	BPS Provinsi Kalimantan Barat	1	-	-	1	-	-	1	-	1

No.	Wilayah		Verifikasi				Tindak Lanjut			Status	
	Kode	Nama Wilayah	Total	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Non Pengaduan	Telaah	Pelimpahan	Tutup	Proses	Selesai
30	6200	BPS Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	6300	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	1	-	1	-	-	-	1	-	1
32	6400	BPS Provinsi Kalimantan Timur	3	2	1	-	1	-	2	1	2
33	6500	BPS Provinsi Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	7100	BPS Provinsi Sulawesi Utara	1	1	-	-	-	-	1	-	1
35	7200	BPS Provinsi Sulawesi Tengah	3	1	2	-	1	-	2	1	2
36	7300	BPS Provinsi Sulawesi Selatan	2	2	-	-	1	-	-	1	-
37	7400	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	1	-	-	1	-	-	1	-	1
38	7500	BPS Provinsi Gorontalo	1	1	-	-	-	-	1	-	1
39	7600	BPS Provinsi Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	8100	BPS Provinsi Maluku	2	1	1	-	1	-	1	-	2
41	8200	BPS Provinsi Maluku Utara	1	1	-	-	-	-	1	-	1
42	9100	BPS Provinsi Papua Barat	1	1	-	-	-	-	1	-	1
43	9400	BPS Provinsi Papua	1	1	-	-	-	-	1	-	1
Total			156	46	47	63	21	1	120	18	124

Lampiran 3
 Nomor : T-14a/08300/PW.120/LHN/2026
 Tanggal: 30 Juni 2026

LAPORAN BERDASARKAN MEDIA PENGADUAN PADA SP4N-LAPOR!

Saluran Masuk	Jumlah
Android	413
Call Center	13
Chatbot (Telegram)	1
Email Instansi	144
Facebook	5
Hotline Service	17
Instagram	406
Pos Surat	54
Radio	1
SMS	1
Surat Kabar	2
Tatap Muka	905
Telepon	4
Website	220
Website Institusi	26
Whatsapp	1478
(blank)	164
Total	3854

Lampiran 4
 Nomor : T-14a/08300/PW.120/LHN/2026
 Tanggal: 30 Juni 2026

LAPORAN BERDASARKAN LOKASI PENGADUAN PADA SP4N-LAPOR!

No	Kode	Unit Kerja	Laporan Masuk	Status Laporan				Presentase Tindak Lanjut	Presentase Laporan Selesai
				Belum Terverifikasi	Belum Ditindaklanjuti	Proses	Selesai		
1	0000	BPS Pusat	33	0	0	4	29	100.00	87.88
2	1100	BPS Prov. Aceh	23	0	0	0	23	100.00	100.00
3	1200	BPS Prov. Sumatera Utara	181	0	0	0	181	100.00	100.00
4	1300	BPS Prov. Sumatera Barat	460	0	0	0	460	100.00	100.00
5	1400	BPS Prov. Riau	151	0	0	0	151	100.00	100.00
6	1500	BPS Prov. Jambi	71	0	0	0	71	100.00	100.00
7	1600	BPS Prov. Sumatera Selatan	125	0	0	7	118	100.00	94.40
8	1700	BPS Prov. Bengkulu	45	0	0	0	45	100.00	100.00
9	1800	BPS Prov. Lampung	78	0	0	0	78	100.00	100.00
10	1900	BPS Prov. Kep. Bangka Belitung	83	0	0	0	83	100.00	100.00
11	2100	BPS Prov. Kepulauan Riau	40	0	0	0	40	100.00	100.00
12	3100	BPS Prov. DKI Jakarta	74	0	0	0	74	100.00	100.00
13	3200	BPS Prov. Jawa Barat	10	0	0	5	5	100.00	50.00
14	3300	BPS Prov. Jawa Tengah	322	0	0	0	322	100.00	100.00
15	3400	BPS Prov. D.I. Yogyakarta	11	0	0	0	11	100.00	100.00
16	3500	BPS Prov. Jawa Timur	826	0	0	0	826	100.00	100.00
17	3600	BPS Prov. Banten	12	0	0	0	12	100.00	100.00
18	5100	BPS Prov. Bali	161	0	0	0	161	100.00	100.00
19	5200	BPS Prov. Nusa Tenggara Barat	12	0	0	0	12	100.00	100.00

No	Kode	Unit Kerja	Laporan Masuk	Status Laporan				Presentase Tindak Lanjut	Presentase Laporan Selesai
				Belum Terverifikasi	Belum Ditindaklanjuti	Proses	Selesai		
20	5300	BPS Prov. Nusa Tenggara Timur	8	0	0	0	8	100.00	100.00
21	6100	BPS Prov. Sulawesi Barat	142	0	0	0	142	100.00	100.00
22	6200	BPS Prov. Kalimantan Barat	5	0	0	0	5	100.00	100.00
23	6300	BPS Prov. Kalimantan Tengah	201	0	0	0	201	100.00	100.00
24	6400	BPS Prov. Kalimantan Selatan	244	0	0	0	244	100.00	100.00
25	6500	BPS Prov. Kalimantan Timur	17	0	0	0	17	100.00	100.00
26	7100	BPS Prov. Kalimantan Utara	27	0	0	0	27	100.00	100.00
27	7200	BPS Prov. Sulawesi Utara	77	0	0	0	77	100.00	100.00
28	7300	BPS Prov. Sulawesi Tengah	43	0	0	0	43	100.00	100.00
29	7400	BPS Prov. Sulawesi Selatan	18	0	0	0	18	100.00	100.00
30	7500	BPS Prov. Sulawesi Tenggara	227	0	0	0	227	100.00	100.00
31	7600	BPS Prov. Gorontalo	39	0	0	0	39	100.00	100.00
32	8100	BPS Prov. Maluku	35	0	0	0	35	100.00	100.00
33	8200	BPS Prov. Maluku Utara	21	0	0	0	21	100.00	100.00
34	9100	BPS Prov. Papua	14	0	0	0	14	100.00	100.00
35	9400	BPS Prov. Papua Barat	18	0	0	0	18	100.00	100.00
Total			3854	0	0	16	3838	100.00	98.07

Lampiran 5
 Nomor : T-14a/08300/PW.120/LHN/2026
 Tanggal: 30 Juni 2026

LAPORAN TERKAIT SENSUS EKONOMI 2026 BERDASARKAN LOKASI PENGADUAN

No.	Wilayah		Verifikasi				Tindak Lanjut			Status	
	Kode	Nama Wilayah	Total	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Non Pengaduan	Telaah	Pelimpahan	Tutup	Proses	Selesai
1	0000	Badan Pusat Statistik	15	-	-	-	-	-	14	1	14
2	0100	Kepala BPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0200	Sekretariat Utama	1	-	-	-	1	-	-	-	-
4	0300	Deputi Bidang Metodologi Dan Informasi Statistik	5	-	-	-	-	-	1	4	1
5	0400	Deputi Bidang Statistik Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0500	Deputi Bidang Statistik Produksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0600	Deputi Bidang Statistik Distribusi Dan Jasa	1	-	-	-	-	-	1	-	1
8	0700	Deputi Bidang Neraca Dan Analisis Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0800	Inspektorat Utama	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1100	BPS Provinsi Aceh	1	-	-	-	-	-	1	-	1
11	1200	BPS Provinsi Sumatera Utara	14	-	-	-	-	-	12	2	12
12	1300	BPS Provinsi Sumatera Barat	54	-	-	-	-	-	54	-	54

No.	Wilayah		Verifikasi				Tindak Lanjut			Status	
	Kode	Nama Wilayah	Total	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Non Pengaduan	Telaah	Pelimpahan	Tutup	Proses	Selesai
13	1400	BPS Provinsi Riau	17	-	-	-	-	-	17	-	17
14	1500	BPS Provinsi Jambi	36	-	-	-	-	-	35	1	35
15	1600	BPS Provinsi Sumatera Selatan	9	-	-	-	1	-	6	1	7
16	1700	BPS Provinsi Bengkulu	5	-	-	-	1	-	4	-	4
17	1800	BPS Provinsi Lampung	19	-	-	1	2	-	17	-	18
18	1900	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4	-	-	-	-	-	4	-	4
19	2100	BPS Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	3100	BPS Provinsi D.K.I Jakarta	2	-	-	-	-	-	2	-	2
21	3200	BPS Provinsi Jawa Barat	19	-	-	-	5	-	9	5	9
22	3300	BPS Provinsi Jawa Tengah	67	-	-	-	1	-	66	-	66
23	3400	BPS D.I. Yogyakarta	3	-	-	-	2	-	1	-	2
24	3500	BPS Provinsi Jawa Timur	132	-	-	-	3	-	123	2	124
25	3600	BPS Provinsi Banten	3	-	-	-	3	-	-	-	-
26	5100	BPS Provinsi Bali	15	-	-	-	-	-	15	-	15
27	5200	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	2	-	-	-	-	-	1	1	1
28	5300	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	2	-	-	-	-	-	2	-	2
29	6100	BPS Provinsi Kalimantan Barat	1	-	-	-	-	-	1	-	1

No.	Wilayah		Verifikasi				Tindak Lanjut			Status	
	Kode	Nama Wilayah	Total	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Non Pengaduan	Telaah	Pelimpahan	Tutup	Proses	Selesai
30	6200	BPS Provinsi Kalimantan Tengah	20	-	-	-	-	-	20	-	20
31	6300	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	21	-	-	2	1	-	20	-	20
32	6400	BPS Provinsi Kalimantan Timur	5	-	-	-	1	-	4	-	4
33	6500	BPS Provinsi Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	7100	BPS Provinsi Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	7200	BPS Provinsi Sulawesi Tengah	4	-	-	-	1	-	2	-	2
36	7300	BPS Provinsi Sulawesi Selatan	3	-	-	-	2	-	-	1	-
37	7400	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	14	-	-	-	-	-	14	-	14
38	7500	BPS Provinsi Gorontalo	1	-	-	-	-	-	1	-	1
39	7600	BPS Provinsi Sulawesi Barat	6	-	-	-	-	-	6	-	6
40	8100	BPS Provinsi Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	8200	BPS Provinsi Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	9100	BPS Provinsi Papua Barat	13	-	-	-	-	-	13	-	13
43	9400	BPS Provinsi Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			514	-	-	3	24	-	466	18	470